

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan dalam menjelaskan, menjernihkan, mengidentifikasi perbedaan serta persamaan pemikiran penulis lain dalam penelitian atau pembahasan mengenai isu ini. Selain itu, sebuah penelitian harus mengutip penelitian sebelumnya sehingga lebih mudah bagi pembaca untuk melihat dan membandingkan perbedaan strategi yang penulis gunakan dalam membahas isu yang serupa. Penelitian terdahulu yang mempunyai teori yang sama dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Suciana & Dayat (2022) tentang Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat (Studi Deskriptif Di Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur). Kesimpulan dari penelitian terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bekasi masih kurang baik dikarenakan komunikasi antar instansi pemerintah daerah dengan Desa Cipayung belum terjalin dengan baik dan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi belum terlaksana adalah tentang struktur birokrasi. Namun, ada beberapa faktor yang dapat membantu usaha kecil dan mikro berkembang sehingga dapat tumbuh lebih baik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Marliya (2019), dengan judul Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palu. Fokus studi ini mencakup empat faktor utama yaitu, Faktor komunikasi, Faktor sumber daya, Faktor sikap, dan Faktor struktur birokrasi. Hasil studi menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan belum efektif sebagaimana mestinya dalam hal komunikasi, struktur birokrasi, sikap, dan sumber daya. Dampak program Raskin terhadap masyarakat miskin di Kota Palo terletak pada perilaku atau tindakan pembuat kebijakan yang kurang transparan dalam proses penyampaian program ini.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Navillah & Hamdie (2021), tentang tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Oleh Kantor Desa Bi-Ih Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga Yang Terdampak

Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat dari empat pengukuran. Pertama, sosialisasi berhasil meskipun ada beberapa peserta atau masyarakat yang tidak hadir. Kedua, sumber daya mengidentifikasi 140 penerima BLT berdasarkan prosedur musyawarah desa khusus (Musdesus). Ketiga, disposisi dan pengawasan dilakukan sesuai ketentuan dan diawasi oleh pemerintah kota dan kepolisian. Keempat, struktur birokrasi berjalan disiplin dalam penyaluran BLT. Faktor pendukungnya yaitu penyaluran bantuan menjadi tanggung jawab RT/RW, staf lokal, dan organisasi lokal yang bekerja sebagai koalisi. Faktor penghambatnya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pendataan penerima BLT.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Djaenal & Kaawoan (2021), tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. Hasil penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum mencapai hasil yang diharapkan. Faktor ini terjadi akibat adanya beberapa indikator yang masih belum mencapai hasil yang diharapkan, seperti komunikasi pada masyarakat yang belum berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan belum mengertinya masyarakat terkait dengan prosedur pelaksanaannya. Selanjutnya untuk fasilitas yang digunakan masih seringkali mengalami gangguan jaringan sehingga banyak dari KPM yang kesulitan dalam mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan pelaksana dari program BPNT ini memiliki sikap yang sangat baik kepada KPM. Pemerintah setempat juga sangat kooperatif dalam menjalankan program ini sesuai dengan petunjuk pelaksana yang dinuat oleh pemerintah pusat.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anhara & Kariem (2023), tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Sosial Kota Palembang. Kesimpulan dari penelitian ini menggunakan teori Edward belum sesuai dengan yang diharapkan oleh teori George C. Edward III yang dimana terdapat beberapa faktor yang tidak terpenuhi. Meskipun terdapat beberapa faktor yang berjalan dengan baik

seperti faktor komunikasi yang berjalan dengan baik karena semua instansi baik dari RT/RW sampai dinas sosial melakukan koordinasi dan rapat rutin yang membahas pendataan sampai dengan evaluasi program. Faktor sumberdaya juga berjalan dengan baik hal ini dikarenakan karena terpenuhi semua kriteria mulai dari jumlah pegawai yang mencukupi sampai dengan kualitas pegawai yang kompeten. Akan tetapi pada faktor disposisi ini masih mengalami hambatan, karena masih banyak salah sasaran hal ini disebabkan oleh penginputan data penerima manfaat yang tidak kunjung diupdate. Sedangkan faktor birokrasi berjalan dengan baik karena terdapat SOP yang memadai sehingga pembagian tugas setiap pelaksananya itu berjalan dengan lancar.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Febrian & Muljanto (2024) tentang Implementasi Kebijakan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Menangani Kemiskinan Oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Kesimpulan dari riset ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut menggunakan teori George C. Edward II berjalan dengan baik dan optimal. Dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik dan dikomunikasikan dengan jelas, sumberdaya juga dikelola dengan baik, struktur birokrasi diterapkan sesuai dengan pedoman yang ada. Program ini bisa dikatakan berjalan maksimal.
7. Penelitian yang dilakukan oleh Rogahang & Tulus (2023) tentang Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Desa Molompar Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan masih menghadapi beberapa tantangan. Dari indikator komunikasi, terdapat hambatan seperti miskomunikasi antara pelaksana kebijakan yang menyebabkan informasi mengenai penerima bantuan tidak sepenuhnya akurat dengan kondisi di lapangan. Dari indikator sumber daya, sumber daya manusia (SDM) belum dimanfaatkan secara optimal karena terdapat beberapa masyarakat yang tidak memanfaatkan keterampilannya yang dimilikinya untuk berinovasi dan menghasilkan usaha. Dari indikator sikap, sikap yang dimiliki oleh para pelaksana masih belum optimal, sehingga

sering terjadi kesalahan dalam penjelasan kebijakan program bantuan, yang berdampak pada masyarakat penerima bantuan. Dari indikator struktur birokrasi, ditemukan bahwa struktur birokrasi masih kurang efisien, sehingga diperlukan peninjauan kembali terhadap aturan dan keputusan yang telah dibuat oleh pelaksana kebijakan sebelumnya.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Imania & Soraida (2022), tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut tidak berjalan dengan lancar, yang disebabkan ada indikator yang belum berjalan dengan baik. Seperti pada faktor komunikasi yang berjalan belum efektif, hal ini dibuktikan dengan data yang ada pada pendamping masih belum akurat. Selanjutnya, pada faktor sumberdaya yang masih terbatas hal ini bisa dilihat dari pendanaan program dan fasilitas yang ada masih belum berjalan dengan maksimal. Dan pada faktor struktur birokrasi belum berjalan dengan baik karena pada SOP belum mengikuti pedoman pelaksanaan PKH yang ada sehingga terjadi keterlambatan dalam penyaluran bantuan tersebut.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Lombok & Kairupan (2022), tentang Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Karang Taruna di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian pada implementasi perbub No 58 tahun 2020 menggunakan teori George C.Edward III masih belum berjalan dengan maksimal. Karena pada penelitian tersebut masih adanya faktor yang belum berjalan dengan optimal seperti yang diinginkan oleh Edward. Seperti pada faktor struktur birokrasi yang dimana dinilai terlalu kaku dan bisa jadi hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut. Sedangkan pada ketiga faktor lainnya seperti komunikasi sumberdaya dan disposisi berjalan dengan efektif sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.
10. Penelitian yang dilakukan oleh Kristian (2022) tentang Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut. Hasil riset dapat disimpulkan bahwa kebijakan pelaksanaannya memakai teori George C.Edward III belum berjalan dengan maksimal

karena tidak berjalan dengan lancar dalam Implementasi PKH di kabupaten Garut tersebut. Seperti pada faktor komunikasi karena para pendamping PKH menggunakan media online maka ada beberapa kendala seperti KPM yang sulit berkomunikasi karena buruknya jaringan. Faktor sumberdaya, KPM merasa bahwa mereka kurang diperhatikan oleh pendamping PKH karena jauhnya jarak dari pusat Kecamatan. Sedangkan dalam faktor disposisi masih belum berjalan dengan baik, karena masih adanya masyarakat atau KPM yang tergolong mampu tapi masih terdaftar dalam penerima program PKH tersebut. Dan pada faktor struktur birokrasi berjalan dengan baik karena SOP yang ada semuanya mendukung dalam program tersebut.

11. Penelitian yang dilakukan oleh Brianita (2024), tentang Implementasi Program Keluarga Harapan Perlindungan Lanjut Usia (Pkh Plus) di Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program tersebut belum mencapai yang diharapkan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor. Karena pada faktor sumberdaya yang belum diimplementasikan dengan optimal, yang ditunjukkan dengan pembagian tugas yang masih belum merata. Sedangkan di faktor komunikasi telah ditransmisikan dengan baik, karena data yang ada yaitu data DTKS telah disalurkan sesuai yang ada di lapangan. Faktor disposisi telah berjalan dengan efektif, terbukti pengaturan birokrasi dengan efektif. Faktor struktur birokrasi juga telah diimplementasikan dengan baik yang dibuktikan dengan adanya tanggung jawab dan SOP yang tercantum dalam SK.

B. Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

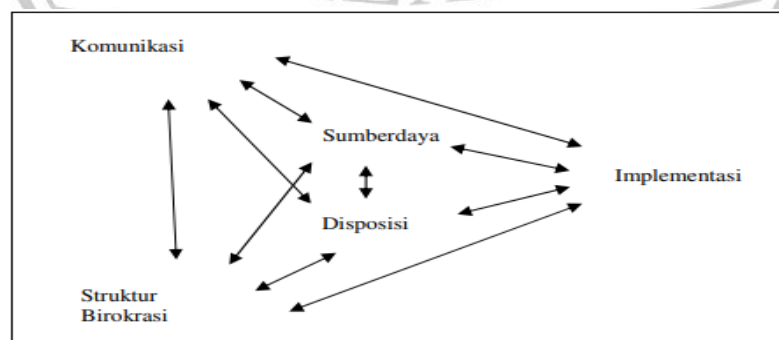
implementasi memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan. Biasanya, terminologi ini digunakan untuk menggambarkan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Sedangkan dalam buku Webster dalam (Yuliah, 2020) menjelaskan bahwa implementasi menyediakan fasilitas untuk

melaksanakan kegiatan dan menghasilkan suatu pengaruh yang signifikan. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa dalam mengimplementasikan sesuatu harus didukung dengan fasilitas yang cukup baik, sehingga pelaksanaan tersebut akan menghasilkan pengaruh yang cukup besar.

Menurut Mansur (2021), Implementasi kebijakan berarti mewujudkan keputusan mengenai kebijakan dasar yang telah ditetapkan. Kebijakan ini biasanya diatur dalam undang-undang, memberikan kerangka hukum yang jelas bagi pelaksanaannya. Namun, suatu kebijakan dapat berbentuk arahan yang cukup penting yang memiliki fungsi sebagai panduan operasional. Idealnya keputusan-keputusan ini tidak hanya menjelaskan masalah yang ingin diselesaikan, tetapi juga menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, keputusan-keputusan tersebut menggambarkan struktur proses implementasi dengan rinci, termasuk Upaya yang harus dilakukan, sumber daya yang diperlukan, dan mekanisme pengawasan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaannya.

Selanjutnya, implemmtasi kebijakan memiliki proses yang cukup panjang yang dimana proses tersebut selalu bergerak kearah yang lebih baik, para pelaksana mengimplementasikan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati. Munculnya sebuah implementasi kebijakan public dikarenakan perbuatan dan keinginan pemerintah dalam mengatasi isu-isu sosial yang ada di masyarakat (Ardian & Purba, 2021). Sementara itu implementasi kebijakan berdasarkan pendapat George C. Edward III terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Gambar 2 Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi menurut Edward III



a) Komunikasi

Komunikasi memegang peranan yang sangat signifikan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Jika ingin mencapai implementasi yang efektif tidak hanya berupa petunjuk-petunjuk yang jelas saja, akan tetapi juga memerlukan konsistensi sebuah kebijakan atau instruksi dari atas ke bawah ataupun sebaliknya. Sehingga jika kebijakan tersebut sudah disampaikan dengan jelas dan konsisten maka para pelaksana tidak akan salah dalam menafsirkan kebijakan tersebut. Sehingga sangat penting untuk menghindari salah paham atau miskomunikasi yang dapat menyebabkan masalah bagi pelaksana karena ketidakjelasan dalam penafsiran kebijakan. Dalam sebuah kebijakan ketepatan sebuah informasi sangatlah penting agar para pelaksana dapat mengetahui tujuan yang ingin diraih dan mengambil tindakan yang harus mereka ambil.

Dengan kata lain, agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif, para pelaksana perlu memahami dengan jelas target yang akan dicapai dari instruksi tersebut. Dalam konteks komunikasi ini, terdapat beberapa indikator penting dalam dimensi komunikasi, antara lain:

- 1) Transmisi: penyampaian informasi yang efektif akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang baik. Akan tetapi penyampaian informasi seringkali terjadi salah pengertian sehingga pesan yang disampaikan tidak dapat disampaikan dengan benar.
- 2) Kejelasan: Komunikasi yang dijalankan tidak boleh menghasilkan informasi yang tidak jelas dan tidak ambigu bagi para pelaksana. Jika informasi yang diterima tidak jelas akan menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana sehingga hal ini menyebabkan para pelaksana tidak mengerti tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut.
- 3) Konsistensi: komunikasi yang dilaksanakan oleh pembuat kebijakan harus berjalan dengan konsisten tanpa adanya perubahan sewaktu-waktu. karena jika kebijakan tidak konsisten dan sering berubah maka akan menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana sehingga dapat menimbulkan gagalnya kebijakan tersebut.

b) Sumber Daya

Sumber Daya juga mempunyai peran yang signifikan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan. Meskipun aturan-aturan yang ditetapkan jelas dan konsisten, serta disampaikan dengan jelas, jika sumber daya manusia yang bertanggung jawab kurang memiliki kemampuan untuk menjalankan tugasnya secara efektif, kebijakan tersebut tidak akan diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli yang kompeten dan jumlah yang cukup. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan diperlukan pegawai yang kompeten dibidangnya dan tugasnya agar pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Daham hal Sumber Daya ini terdapat beberapa indikator penting dalam dimensi Sumber Daya antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia adalah sumber utama dalam pelaksanaan kebijakan. Dalam pelaksanaannya diperlukan pegawai yang berkualitas dan juga jumlah yang cukup dalam pelaksanaan program tersebut. Maka dari itu diperlukanlah kualitas dan jumlah yang cukup dalam pelaksanaan kebijakan agar mencapai tujuan yang ada di kebijakan tersebut.
- 2) Sumber Daya Anggaran, yang terbatas menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga menjadi terbatas.
- 3) Fasilitas: merupakan indikator yang cukup penting untuk sebuah pelaksanaan perintah atau kebijakan. Dengan adanya dukungan seperti sarana dan prasarana maka dapat dipastikan akan mudah untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan.

c) Disposisi

Disposisi adalah sikap yang menekankan pada keinginan dan kesepakatan bagi para pelaksana dan pembuat kebijakan demi mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang efektif. Disposisi berkaitan dengan kesiapan para pelaksana untuk mengimplementasikan perintah atau kebijakan. Jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana tidak cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan

diperlukan ketertarikan untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Dispose dibagi menjadi beberapa indikator antara lain;

- 1) Sikap: dalam melaksanakan sebuah kebijakan sikap para pelaksana ini menjadi salah satu kunci penting dalam mengimplementasikan sebuah perintah atau kebijakan. Karena para pelaksana tidak hanya mengetahui mengenai tugas dan langkah-langkah pelaksanaannya tetapi juga harus memiliki kecenderungan sikap yang baik dalam melaksanakan perintah tersebut.
- 2) Insentif: bisa digunakan untuk mengatasi masalah keinginan bagi para pelaksana. Maka pemberian insentif bagi para pelaksana diharapkan dapat mendorong para pelaksana agar dapat bekerja lebih giat lagi dalam implementasi kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan, maka dari itu diperlukan struktur birokrasi yang baik agar pelaksanaan kebijakan berjalan optimal. Model birokrasi yang baik mencakup koordinasi yang baik antara organisasi yang berperan dalam penerapan kebijakan dan manajemen kegiatan tersebut baik dari tahap perumusan kebijakan hingga implementasi di lapangan. Dalam pelaksanaannya sangatlah rumit sehingga membutuhkan banyak pihak. Maka dari itu jika suatu birokrasi itu tidak mendukung maka akan sulit untuk mencapai target dari kebijakan yang ada. Menurut Edwards III, birokrasi memiliki dua indikator utama, antara lain;

- 1) *Standard Operational Procedure* SOP: Seperangkat prosedur yang memastikan bahwa proses dilaksanakan secara konsisten. Melalui SOP dapat mengoptimalkan penggunaan kesempatan yang ada dan meningkatkan kinerja karyawan dan meningkatkan kinerja karyawan dalam birokrasi yang rumit dan Panjang. Sehingga dapat menciptakan ruang yang luas dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja.

- 2) Fragmentasi: penyebaran tanggung jawab kebijakan ke banyak organisasi berbeda, sehingga memerlukan koordinasi di antara mereka

2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu atau keluarga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara tercukupi (Adawiyah, 2020). Kebutuhan dasar ini meliputi makanan yang cukup untuk menjaga kesehatan dan kekuatan, pakaian yang memadai untuk melindungi dari alam dan menjaga martabat, serta tempat tinggal yang aman dan layak. Selain itu, kemiskinan juga menjadi hambatan terhadap akses pendidikan, yang menghalangi seseorang mendapatkan wawasan dan kemampuan yang dibutuhkan guna meningkatkan taraf hidup mereka. Akses yang terbatas pada layanan kesehatan juga merupakan faktor signifikan dalam kemiskinan, karena orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak mampu membeli perawatan medis yang dibutuhkan untuk mengatasi atau mengobati penyakit, yang akhirnya memperburuk kondisi mereka.

Sedangkan, menurut BPS (2023), kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonominya, material, dan fisik dasar, baik pangan maupun papan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM), yang memiliki dua komponen utama Garis Kemiskinan Pangan (GKP) adalah ukuran jumlah pengeluaran minimum yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan dasar makanan, dihitung berdasarkan kebutuhan energi 1.200 kalori, jumlah minimum ini menggambarkan apa yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Kesehatan dan produktivitas yang baik. Sementara itu, Strategi Penanggulangan Kemiskinan Non-Makanan (Non-Food Poverty Reduction Strategy/NFPRS) melibatkan pengeluaran sejumlah uang minimum untuk kebutuhan dasar selain makanan, seperti sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk yang dibutuhkan untuk mengakses layanan dan barang penting. Seseorang dapat menjalani kehidupan yang baik dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial

Konsep kemiskinan ini meningkatkan pemahaman sosial kemanusiaan tentang kemiskinan, tidak hanya terbatas pada kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, akses terhadap perlakuan yang adil, dan Kekurangan, serta paparan terhadap kejahatan. Terdapat risiko menerima perlakuan negatif dalam politik, dan terutama kegagalan dalam meningkatkan kesehatan seseorang. Maka dari itu pandangan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang memiliki banyak sisi, ada empat jenis kemiskinan yang dapat diidentifikasi (Sinurat, 2023).

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut bisa dikatakan bahwa seseorang atau keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya seperti sandang, pendidikan, kesehatan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Konsep kemiskinan absolut sering dijadikan acuan dalam menetapkan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau keluarga tertentu yang tergolong masyarakat miskin, karena memberikan ukuran yang jelas dan terukur mengenai ketidakmampuan mereka untuk mencapai standar hidup yang memadai.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merujuk pada individu atau keluarga yang diakibatkan karena perbedaan pendapatan yang tidak seimbang yang disebabkan oleh kemajuan yang tidak merata. Dalam konteks ini, kemiskinan relatif terjadi karena tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kelompok-kelompok yang lebih mampu dan mereka yang kurang beruntung. Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh inisiatif pembangunan ini sering kali disebut sebagai daerah tertinggal. Di daerah tertinggal, masyarakat menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dan peluang yang sama, yang memperparah ketidaksetaraan dan memperkuat kondisi kemiskinan relatif. Dengan demikian, kemiskinan relatif mencerminkan ketidakadilan sosial yang timbul dari perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan, yang disebabkan oleh ketidakmerataan dalam distribusi hasil-hasil pembangunan.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah jenis kesengsaraan yang timbul dari adat istiadat yang enggan untuk mengadopsi cara-cara modern dalam meningkatkan taraf hidup. Sikap dan kebiasaan ini dapat mencakup perilaku malas, pemborosan, dan ketidakmampuan untuk mengelola sumber daya secara efisien, yang menghambat kemampuan untuk mengubah kondisi ekonomi mereka. Selain itu, kemiskinan kultural juga dapat ditandai oleh kurangnya kreativitas dan inovasi dalam mencari solusi untuk masalah ekonomi serta ketergantungan yang tinggi pada bantuan dari pihak lain. Keberadaan kebiasaan-kebiasaan ini memperburuk kondisi kemiskinan karena menghambat upaya untuk mengatasi ketidakmampuan ekonomi melalui perubahan perilaku yang positif dan penerapan strategi-strategi yang lebih efektif untuk perbaikan hidup.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang muncul akibat pola dan struktur sosial yang telah melekat pada kelompok masyarakat tertentu. Struktur ini menciptakan ketidaksetaraan akses dan peluang, sehingga anggota masyarakat tersebut sering kali terjebak dalam kondisi yang menghambat mereka untuk memanfaatkan sumber daya yang sebenarnya tersedia di sekitarnya. Faktor-faktor seperti diskriminasi sosial, ketimpangan distribusi kekayaan, atau kebijakan publik yang kurang inklusif dapat memperparah situasi ini. Akibatnya, masyarakat yang berada dalam lingkaran kemiskinan struktural sulit keluar dari jerat kemiskinan karena menghadapi hambatan sosial dan sistemik yang mencegah mobilitas.

3. Kemiskinan Eksrem

Suatu kondisi masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem adalah suatu keadaan dimana seseorang atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, air layak, perumahan, dan informasi. Situasi ini tidak hanya berdampak pada masyarakat berpendapatan rendah tetapi juga membatasi akses ke layanan sosial yang penting. Peraturan Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Penanggulangan Kemiskinan belum memuaskan (Kepmenko PMK, 2022). Pada Pasal 2 ayat 1 yang dimaksud dengan “masyarakat sangat miskin adalah masyarakat yang hanya mampu mencukupi kehidupan hariannya dengan pendapatan tidak lebih dari 1,9 pada Paritas Daya Beli yaitu sebesar Rp 10.739 atau setara dengan Rp 1.288.680 per orang per hari atau Rp. Secara sederhana, jika sebuah keluarga beranggotakan 4 orang, jika penghasilan satu keluarga per bulan kurang dari Rp. 1.288.680, maka keluarga tersebut tergolong sangat miskin.

Sedangkan, penduduk dikategorikan sebagai miskin biasa jika pengeluaran harian mereka mencapai Rp 17.851 per orang, yang setara dengan Rp 535.547 per orang per bulan (BPS, 2023). Sebagai contoh, sebuah keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga, termasuk dalam kategori miskin biasa jika total pengeluaran bulanan mereka kurang dari Rp2.142.188. Angka ini mencerminkan batas pengeluaran untuk memenuhi keperluan dasar dan mempertahankan standar hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi miskin ekstrem, tetapi masih di bawah ambang batas kesejahteraan yang memadai. Perbedaan antara kemiskinan biasa dan kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari pengeluaran harian yang diperlukan kemiskinan ekstrem diukur dengan pengeluaran harian sebesar Rp10.739 atau Rp322.170 per bulan, sedangkan kemiskinan biasa memerlukan pengeluaran harian sebesar Rp17.851 atau Rp535.547 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem berada pada tingkat yang lebih rendah, dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas, sedangkan kemiskinan biasa menunjukkan kondisi yang sedikit lebih baik namun tetap di bawah standar kesejahteraan yang optimal.